

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 1
 Provinsi : Kalimantan Barat
 Pimpinan Sidang 1 : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D
 Pimpinan Sidang 2 : Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D
 Notulis Aplikasi : Jihan Nur Arviyanto
 Notulis Offline: Ivan Maulana
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bappeda Provinsi Kalimantan Barat</i> 2. <i>Pemda Kabupaten Sintang</i> 3. <i>Pemda Kabupaten Mempawah</i> 4. <i>Pemda Kabupaten Kubu Raya</i> 5. <i>Pemda Kabupaten Landak</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</i> 2. <i>Kementerian Perhubungan</i> 3. <i>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</i> 4. <i>Kementerian Kesehatan</i> 5. <i>Kementerian Kelautan dan Perikanan</i> 6. <i>Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah</i> 7. <i>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</i> 8. <i>Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat</i> 2. <i>Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi</i> 3. <i>Direktorat Pembangunan Daerah</i> 4. <i>Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</i> 5. <i>Direktorat Regional II</i> 6. <i>Direktorat Perumahan dan Pemukiman</i> 7. <i>Direktorat Kelautan dan Perikanan</i> 8. <i>Direktorat Transportasi</i>

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
1	07 - Pembangunan Bandar Udara Kayong Utara	189	189	ha	Kab. Kayong Utara	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DIAKOMODIR: Dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan seperti RC, FS,DED, dengan pagu anggaran yang disepakati dalam TM Pasca SBPI	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas		001 - Bandar Udara Baru		
		Catatan dan Tanggapan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan Kayong utara sudah masuk RPJMN 2020-2024, pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan, kemenhub menunggu RPJMN periode selanjutnya 2025-2029 apakah kayong utara akan tetap masuk Terkait anggaran sangat terbata, mohon dukungan untuk kesediaan anggaran jika tetap dilaksanakan. RC sudah selesai di tahun 2021, FS dan DED tetap diproses jika akan dilaksanakan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit Transport Sudah didiskusikan usulan Musrenbang, terkait bandara kayong utara merupakan carryover dari RPJMN 2020-2024, akan dilakukan penajaman Kembali bandara baru di periode baru sembari menunggu pemerintahan baru. Anaggaran kemenhub menurun sekitar 50% dari tahun anggaran sebelumnya sehingga ada monotarium sehingga hanya sebatas pemutakhiran sehingga perlu dibahas lebih lanjut - Tanggapan: Pak Roudo (Pimpinan Sidang 1): Tidak bisa dibahas lanjut, sehingga usulan akan iakomodir selama ada pendanaannya ada. Pak Yudo (PJ Regional): Usulan sudah direkomendasikan sebelumnya sehingga usulan bisa dilaksanakan bahkan 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

						tanpa catatan sepanjang readiness criteria sudah siap maka Bappenas sektor dan K/L dapat mengawal usulan ini. Hindari catatan terkait ketersediaan anggaran, jika ada catatan hanya bagian teknis			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	08 - Pembangunan Jalan Tebas-Merbau	25	25	Km	Kab. Sambas	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Karena belum ada kesiapan RC. Tetap dilakukan penyelesaian RC untuk dapat didorong pendanaan Non-RM. Selama pemerintah Provinsi, Kab/Kota, dan K/L dapat berkoordinasi		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		12 - Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		004 - Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<p>- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat 25 Km masih ada kendala lahan, dari pihak kabupaten sambas tidak sanggup menyediakan lahan sepanjang itu, artinya tidak perlu penanganan baru saja dan fokus pada jalan eksisting (10 Km).</p> <p>Jalan eksisting dari jembatan sambas besar, terase sampe perbatasan terkoneksi hanya tidak masuk kriteria PU (lebar 25 m) hanya 13 m, namun sudah sangat fungsional sehingga dikembangkan saja jalan eksisting, daripada membebaskan lahan untuk mengakomodir usulan sepanjang 25 Km.</p> <p>Kesepakatan awal adalah dengan menggunakan eksisting jalan yang ada. Provinsi mampu, namun memiliki prioritas yang lain. Fungsional terhubungan ke perbatasan melewati</p>	<p>- Bina Marga, Kementerian PUPR Pagu indikatif telah keluar sehingga dengan anggaran yang terbatas belum bisa mengakomodir jalan ini karena bersifat baru</p> <p>Tanggapan: Pak Roudo (Pimpinan Sidang 1): Sudah direkomendasikan di Rakortekrenbang sebelumnya sehingga dapat diprioritaskan terlepas keterbatasan anggaran</p> <p>Pak Yudo (PJ Regional): Musrenbangnas tidak mengikuti SBPI sehingga tidak boleh menjadi rujukan utama dalam forum ini sehingga dalam pembahasan ini jika memang layak SEB dalam SBPI ini dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan usulan ini</p> <p>Perlu adanya upaya dari pemda untuk benar-benar membangun jalan sepanjang 25 Km, agar dapat kami</p>	<p>- Dit Transport Secara strategis mendukung beberapa KSPN, serta Kawasan perbatasan dan simpul transportasi Sepanjang 80 Km, 10 km sudah ada luas eksisting, 70 Km sudah dibuka namun belum selesai, 25 Km yang diusulkan masih ada isu pembebasan lahan yang masih berprogres hingga saat ini, jika lahan sudah siap makan usulan ini masih dapat diakomodir sehingga Pembangunan akan dilakukan secara bertahap.</p> <p>10 Km belum fungsional karena butuh penanganan panjang terkait isu perbatasan Kalimantan. Ruas jalan tersebut bersifat non-status. Jika hanya eksisting maka aka ketidaksesuaian dengan DED. Kedepan mohon RC disiapkan karena ruas jalan sepanjang 80 Km daapt ditangani anggaran Non-RM.</p>	<p style="text-align: center;">untuk membantu penyelesaian RC.</p>
--	--	---	---	---	---

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<p>perkampungan, ruas baru tidak melewati perkampungan</p> <p>Balai ingin menggunakan jalan eksisting, namun DED PU menggunakan terase jalan baru</p> <p>Tanggapan: Pak Roudo (Pimpinan Sidang 1): Jalan non-status belum bisa diintervensi, apakah sudah ada DED di jalan eksisting?</p> <p>Tidak ada DED untuk jalan eksisting</p>	<p>akomodir dengan catatan pemda dapat memenuhi RC, jika hanya sanggup 10 Km maka tidak perlu dilanjutkan.</p>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
3	01 - Pusat Rehabilitasi Gizi	174	174	Titik Lokasi	Provinsi Kalimantan Barat	KEMENTERIAN KESEHATAN	<p>DITOLAK: Tidak ada kegiatan ini di Kementerian Kesehatan dapat diusulkan melalui</p>	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		01 - Kesehatan untuk Semua		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

	Program Kesehatan Masyarakat	Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Daerah	Provinsi/Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi terkait Surveilans Gizi dan KIA/LP	pendanaan DAK
Catatan dan Tanggapan					
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
	<p>- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Angka prevalensi stunting di Kalbar cukup tinggi sekitar 24% walaupun turun dari 27,8%. Sudah ada puskesmas dan telah menjalan fungsinya, namun puskesmas belum ada tempat khusus penangann gizi buruk, seperti sarpras, tenaga Kesehatan, dan lainnya. Dengan kata lain pengembangan 249 Puskesmas yang ada.</p> <p>Paling tidak kami dapat sudah memberikan usulan ke Kemenkes karena kami termasuk 12 daerah dengan angka stunting yang tinggi</p>			<p>- Dit Kesehatan Gizi Masyarakat Belum dapat diakomodir, penanganan gizi sudah terdapat Kawasan tersendiri dari Kemenkes melalui PKMT, Puskesmas, ataupun Posyandu jika da tanda-tanda akan dirujuk ke Rumah Sakit. Ada pengembangan Pustu di desa-desa, sehingga akan lebih terintegrasi. Dapat diusulkan dengan pendanaan lain (DAK Non-Fisik)</p> <p>Tanggapan Pak Roudo (Pimpinan Sidang 1): Kegiatan ini apakah ada di Kementerian Kesehatan? Dan apa kegiatan/intervensi yang dapat didorong di sana?</p>	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

						Tidak ada. Usulan kami focus ke dalam pola asuh dan juga asupan makanan di rumah tangga. Intervensi dapat melalui DAK.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
4	02 Pengembangan Desa Cerdas	10	10	Desa	Provinsi Kalimantan Barat	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DITOLAK: Karena lokasi yang ditangani tidak termasuk ke dalam lokasi prioritas P3PD, namun tetap dapat mempertimbangkan lokasi ke desa-desa perbatasan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Pengembangan Kebijakan Daya Saing, Teknologi dan Inovasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa		001 - Pengembangan Desa Cerdas			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<p>- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat 166 desa di perbatasan negara dan jauh dari pusat pemerintahan, sudah ada potensi namun belum dioptimalkan. Usulan ini untuk mengembangkan 10 desa sebagai pilot project</p> <p>Hanya mengacu pada landak dan sekadau, bukan daerah perbatasan sehingga kapan desa perbatasan ini akan terus tertinggal. Perlu evaluasi apakah dapat dipindahkan ke desa yang lebih membutuhkan.</p> <p>Masihkah ada kesempatan pengembangan desa cerdas di perbatasan? karena belum disahkannya RPJMN 2025-2029 untuk mendukung program pengembangan desa-desa perbatasan. Bagaimana desa-desa ini dapat menjadi prioritas</p> <p>Tanggapan:</p>	<p>- Kemendes PDDT Ada penguatan beberapa lokus di tahun 2024 untuk ditangani di tahun 2025.</p> <p>Pembangunan desa cerdas, lokus disampaikan dalam Rakortek tidak ada yang sama dengan lokus P3PD, sehingga kami tidak dapat mengakomodir untuk lokus baru. Hanya untuk desa Landak dan Sekadau (termasuk dalam lokus P3PD).</p> <p>Jika usulan baru tidak dapat diakomodir karena kami butuh melakukan evaluasi (P3PD) dan juga menyesuaikan anggaran yang ada.</p>	<p>- Sudah masuk dalam P3PD dan kegiatan prioritas dalam RPJMN, catatan kami perlu adanya kriteria dan list desa-desa intervensi.</p> <p>- Lokasi mengikuti dalam program P3PD sehingga disarankan untuk disesuaikan</p>	
--	--	--	---	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Kemendesa PDTT: Dapat menjadi prioritas hanya dengan direktif presiden melalui Inpres							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
5	04 - Pembangunan Politeknik Negeri Sintang	1	1	Unit		KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	DITOLAK: Memanfaatkan perguruan tinggi eksisting untuk membuka PSDKU		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		Pra sarana Bidang Pendidikan Tinggi			003 - Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Provinsi Kalbar IPM, Rata-rata lama sekolah, dan Harapan lama sekolah Kalbar dan Sintang rendah, upaya meningkatkannya dengan mendirikan perguruan tinggi, di mana sintang merupakan pusat pertumbuhan bagian timur Kalimantan Barat. Memang ada Perguruan Tinggi di kota-kota sekitar, namun jaraknya cukup jauh untuk diakses dari Kab. Sintang sehingga diusulkan adanya Pembangunan politeknik ini. - Pemda Kab. Sintang Terkendala beberapa hal walaupun usulan ini sudah diajukan dari tahun 2008 belum diakomodir, kamu usulkan agar usulan ini diajukan ke Tingkat nasional. Kami memerlukan Politeknik ini terkait kebutuhan. 		<ul style="list-style-type: none"> - Dit. Pendidikan Tinggi dan IPTEK Perlu konfirmasi apa ini politeknik baru atau sudah ada, jika baru makan akan cukup sulit. Sintang sudah ada Poltekes dari Kemenkes. Peningkatan SDM sudah ada 81 Perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Barat, dan dengan adanya pendekatan PSDKU (Program Studi Baru di luar Kampus Utama). Adanya penurunan anggaran Kemendikbudristek, Pembangunan ini bukan prioritas. Masih monotarium terkait Pembangunan kampus baru, apabila dasar alasannya adalah lokasi geografis, harapannya dapat ditingkatkan ke peningkatan di sekolah tingkat mengah. PSDKU membuat cabang-cabang ke wilayah yang membutuhkan, namun bukan membangun baru. 	
--	--	--	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Dapat kami sarankan dapat dibukakan PSDKU							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	06 Pembangunan Gedung PLUT	1	1	Unit		KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DITOLAK: Diarahkan melalui pendanaan DAK Fisik, namun masih menunggu Arah Kebijakan dan Tema Besar DAK Fisik tahun ini		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	Penguatan Rantai Pasok Usaha Makro	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		003 - Pengembangan Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Diharapkan dapat dilakukan di Kab. Sambas sebagai beranda utama yang		- Kemenkop UKM Kegiatan ini pendanaan melalui DAK Fisik dan ada forum tersendiri, setuju untuk ditolak namun arah		- Dit. PUMKM Pembangunan ini dapat disuulkan melalui DAK, namun belum ada arah kebijakan (bidang belum			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) sebagai akses perdagangan lintas batas negara, menjadi lumbung pangan Kalimantan Barat sehingga memiliki peranan penting dalam peningkatan nilai tambah yang berdaya saing. Sudah diusulkan pada tahun 2021, namun kami usulkan Kembali karena tidak adanya kelanjutan	kebijakan DAK Fisik ini belum ada tema besarnya		tersedia), kami menolak usulan ini karena dapat dakomodir melalui DAK			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
7	16 - Pembangunan/R rehabilitasi Unit Pembenihan Perikanan	5	5	Unit	Kab. Mempawah	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DITOLAK: Dibahas forum DAK dan mempertimbangkan arah kebijakan dan dapat mempertimbangkan usulan ini sebagai lokasi prioritas	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Perbenihan Ikan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		002 - Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan		
		Catatan dan Tanggapan						

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Hanya pengembangan unit pembibitan untuk air tawar dan air payau. Adanya perpindahan kewenangan terkait penanganan anjungan. 40 Ekor induk mati karena dampak El Nino. Rencananya berfokus pada 10 jenis endemik dalam 5 tahun ini.</p> <p>Setidaknya dijadikan rekomendasi karena walaupun ada menu tapi tidak jadi lokpri. Perlu diingatkan bahwa</p>	<p>- Kementerian Kelautan Perikanan Mendorong melalui DAK karena program terakomodir di menu DAK</p>	<p>- Dit. KKP Adanya penurunan anggaran, berdasarkan hal tersebut UPT Pusat yang langsung ditangani KKPN sehingga tidak dapat diakomodir, melalui dana transfer (DAK).</p> <p>- Dit. PD DAK tahun 2025 agak berbeda karena transisi dan periode Presiden baru, terkait tematik bidang fisik dan non fisik adalah layanan dasar dan infrastruktur dasar. Perlu dikondisikan Kembali sesuai visi-misi presiden terpilih. Menunggu proses RPJMN 2025-2029 program dengan tema atau bidang yang berbeda. Misal, bidang Kesehatan masuk kedalam layanan dasar untuk teknis menu perlu disesuaikan dengan direktorat dan k/l terkait. (Perlu dicermati untuk seluruh usulan yang diarahkan mealalui DAK).</p>	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
8	17 - Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Melalui Budidaya Mutiara-Kerapu, Lobster-Rumput Laut	2	2	Kawasan	Kab. Bengkayang Kab. Ketapang	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	DITOLAK: Dengan catatan diarahkan ke DAK dan mempertimbangkan arah kebijakan dan bidang tematik		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		05 - Penerapan Ekonomi Hijau			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem		003 - Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Sesuai hasil Rakortekrenbang agar diprioritaskan di lokasi lain dan fokus pada komoditas. Komoditas		- Kementerian Kelautan Perikanan Terkait konservasi untuk Katapang sudah masuk dan juga di Sambas. Masih dalam pembahasan		- Dit. KPP Proyeknya ada di PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), namun lokasi di Kalimantan belum ada baru diprioritaskan di lokasi timur			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<p>unggulan meliputi lobster dan rumput laut.</p> <p>Usulan ini sudah ditetapkan melalui SK</p>	<p>Program melalui APBN tidak ada, namun melalui DAK</p>	<p>Indonesia. Kawasan ini sudah ditetapkan sebelumnya?</p> <p>Fokusnya sebenarnya pada kegiatan dikonservasi bukan budidaya, sehingga belum dapat diakomodir. Sementara dapat melalui DAK namun bukan kegiatan budidayanya.</p> <p>Perlu dijelaskan status dari Kawasan ini.</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
9	18 Pembangunan Rusun RSUD Soedarso (ASN)	1	1	Kawasan	Kota Pontianak	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Karena tidak sesuai ketentuan RO baru	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		09 - Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		003 - Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Usulan	Volume				Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan						
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Penyesuaian RO menjadi Rumah susun untuk pasien dari RSUD Soedarso. Jarak kabupaten-kabupaten dengan Kota Pontianak sangat jauh sehingga pasien dapat menginap di pontianak 		<ul style="list-style-type: none"> - BPIW, Kementerian PUPR Terkait Pembangunan rusun ini, sudah masuk kedalam pembahasan konreg PUPR, jika hingga Musrenbangnas RC belum didapatkan, maka belum bisa diakomodir. 		<ul style="list-style-type: none"> - Dit. Perkim Usulan dari selaras dalam untuk ASN, catatan dari kami mendukung selama terpenuhi syarat-syarat, permintaan dan aspek kelembagaannya. Jika ada penyesuaian RO dari bappeda ini, justru belum memenuhi agenda pembangunannya 			
10	09 - Terminal Tipe A Singkawang	1	1	Unit	Kota Singkawang	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DIAKOMODIR: Dengan catatan mempertimbangkan kelengkapan RC dan pembahasan lanjut melalui TM		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Prasarana Bidang Konektivitas Darat		017 - Terminal Penumpang Tipe-A (Prioritas Nasional)			
		Catatan dan Tanggapan							

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Untuk menghubungkan Bis dari Singkawang ke Kucing. Bis berdiam di Singkawang Mall, lahan sudah disiapkan untuk jadi pertimbangan karena bis sudah operasional.</p> <p>RC dibuat oleh Balai BPTD Provinsi Kalbar.</p> <p>Tanggapan: Kemenhub: Apakah DED sudah ada?</p> <p>Juga dikerjakan oleh BPTD, coba di koordinasikan dengan BPTD. RC dan DED sudah tersedia.</p> <p>Tanggapan Bu Andri (Pimpinan Sidang 2): Lebih baik untuk prasyarat sudah dibawa, jika begini maka perlu koordinasikan lagi</p>	<p>- Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub Usulan ini lahannya masih milik Pemda, Jika terminal ingin dibangun, maka aset akan diserahkan kepada Kemenhub/BPTD.</p> <p>Dokumen-dokumen persyaratan tolong berkoordinasi dengan BPTD, jika sudah tersedia maka akan kami bantu support. Usulan Pembangunan ini belum masuk ke dalam Pembangunan tahun 2025, dan belum menerima DED dari usulan ini.</p>	<p>- Dit. Transport Bagaimana status pembebasan lahan bagaimana untuk kebutuhan RC?</p> <p>Usulan ini dari aspek urgensi dan juga layanan antar negara, dapat dikategorikan sebagai prioritas. Akan kami tindak lanjuti dan dibahas melalui TM. Usulan kami diakomodir dengan mempertimbangkan RC dan dokumen persyaratan lainnya.</p>	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	05 - Pembangunan Terminal Barang Internasional (Badau)	1	1	Unit	Kab. Kubu Raya	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DITOLAK: Maksimum bisa beroperasi di bulan Desember 2025		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Prasarana Bidang Konektivitas Darat		099 - Pembangunan Terminal Barang Internasional di Nanga Badau Tahap IV (Termasuk Supervisi)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Dibangun dan diresmikan pada tahun 2022, namun belum optimal padahal ada banyak komoditas unggulan. Terbatasnya fasilitas ini belum bisa mendukung PKS di Badau sehingga		- Kemenhub TBI Badau belum dapat beroperasi karena terbatas regulasi izin operasi (kode port). Perlu tindak lanjut agar di pertengahan atau akhir tahun ini dapat beroperasi, kita akan memaksimalkan fasilitas yang ada, jika usulan ini akan berguna nantinya		- Dit. Transport Ada potensi demand dari barang hasil Perkebunan dan perikanan dapat menjadi masukan bagi kami. Penyediaan cold storage ini perlu dikaji ulang karena operasionalnya belum berjalan. Mohon penjelasan			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<p>di butuhkan penyediaan Cold Storage ini Kodeport sudah ada dapat digabungkan dengan Kodeport Badau.</p>	<p>maka akan kami usulkan kedepannya.</p> <p>Tanggapan: Bu Andr (Pimpinan Sidang 2)ji: DITOLAK karena perlu melihat perkembangan pengoperasiannya</p> <p>Pengelolaan akan di ampu oleh BPTD dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya. Kodeport yang sudah dikeluarkan oleh PBB perlu dilegalitas oleh perartutan Menteri. Jika sudah beroperasi dan membutuhkan cold storage akan kami prioritaskan di tahun depan</p>	<p>lebih lengkap dari Kemenhub terkait prioritas usulan ini.</p> <p>Kemenhub dapat memastikan kapan beroperasinya TBI ini, jika memang tidak dapat dioperasikan maka nanti tidak beroperasinya itu menjadi justifikasinya</p>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
12	10 - Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng	6,3	6,3	Km	Kab. Melawi	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIAKOMODIR: Volume akan disesuaikan oleh anggaran dari K/L
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

	02 - Transformasi Ekonomi	08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	terkait. Sebagai pertimbangan lahan dan juga beberapa jembatan sudah dibangun melalui SBSN.	
	Program	Kegiatan	KRO		RO
	Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 - Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)
	Catatan dan Tanggapan				
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
	<p>Bappeda Provinsi Kalimantan Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses terpendek dari Pontianak ke IKN. Sudah tertuang dalam RTR Pulau Kalimantan. <p>Jalan ini merupakan poros Tengah pulau Kalimantan. Dengan adanya IKN, jalan ini menjadi penghubung terdekat dibandingkan dengan jalan poros Selatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Binar Marga, Kementerian PUPR Terkait ruas ini dari RC sudah siap untuk tahun 2025 fokusnya ke pengembangan jalan bukan Pembangunan jalan sehingga usulan ini belum dapat diakomodir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. Transport Batas kalteng merupakan ruas missing link, ada dua segmen. Isunya masih terkait pembebasan lahan. 5 Km di ujung batas Kalteng belum terbuka yang melalui hutan lindung, sehingga rencana 2025 dapat ditangani bertahap pembangunannya karena jembatan sudah ditangani oleh SBSN. Ditangani bertahap perlu konfirmasi kapan penyelesaian DEDnya. - Dit. Regional 2 Terhubung jika usulan ini dan usulan di sisi lain (Kalteng) juga sama-sama diakomodir, kami sebagai mitra daerah 		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

						sangat merekomendasikan bahwa usulan di diakomodir karena tidak masalah jika Pembangunan dilakukan secara bertahap.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
13	11 - Pembangunan Jalan 2 Jalur Dalam Kota Sekadau	62.29	62.29	Km	Kab. Sintang Kab. Sekadau	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Tidak memenuhi demang sesuai strategi kebijakan perhitungan VCR		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonom		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 - Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Ini satu-satunya urat nadi ke Kalimantan Barat, jika standarnya sama (dengan Jawa) maka memang tidak akan mencukupi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian PUPR Pertimbangan penambahan lajur adalah berdasarkan demand, jika jalan sudah jenuh maka tidak ada penambahan jalur, dan jalan masih dalam kondisi mantap untuk Tingkat kemandapan jalan. Tidak ada regulasi, namun memang ada strategi kebijakan (perhitungan) yang berlaku secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. Transport Pemabangunan tidak dapat diakomodir karena kurangnya demand (berdasarkan perhitungan VCR). Penambahan jalur ada perhitungannya salah satunya adalah demand 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
14	23 - Pelebaran jalan dalam Kota Ngabang	2	2	Km	Kab. Landak	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Dapat diusulkan tahun depan dan dipertimbangkan dalam Jangka Panjang mengingat mulai beroperasinya	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		004 - Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Usulan	Catatan dan Tanggapan				Pelabuhan Kijing	
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Provinsi Kalimantan Bart 2 Km panjang jalan usulan sudah tersedia lahannya. - Beppeda Kab. Landak RC, FS, DED, dan Lahan sudah disiapkan dan sudah diselesaikan oleh Balai PUPR. Memang di dalam kota ngabang jalan ini lah yang fleksibel dan jika nanti sudah banyak industri beroperasi di Pelabuhan kijing maka akan semakin banyak demand akan jalan ini 	<ul style="list-style-type: none"> - BPIW, Kementerian PUPR Maslahnya ketersediaan lahan, apa FS sudah disiapkan juga? Belum bisa diakomodir karena belum memenuhi standar perhitungan VCR (nilainya 0,5). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit. Transport Masih berada di poros Tengah, dan juga menghubungkan akses ke Pelabuhan Kijing dan KI Landak. Bisa jadi jalur terdekat ngabang, bisa ditingkatkan sekarang maupun tahun depan. Karena usulan baru, bagaimana kesiapan RCnya? 			
Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
Usulan	Kesepakatan						
15	19 - Pembangunan SPAM Regional Pendukung Kota Singkawang dan Bandara Singkawang	133333	133333	Jiwa	Kota Singkawang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIAKOMODIR: Dengan catatan perlu adanya penyesuaian nama dan
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Program	Kegiatan	KRO	RO	rencana induk SPAM	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	001 - Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota		
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Persyaratan RC sudah kali lengkapi semua Jika judul diubah maka kebutuhannya tidak bisa diakomodir dengan usulan ini, dan sudah ada proyek SPAM lain untuk mensupport aktivitas di Kijing	- DJCK, Kementerian PUPR Sudah terbit namun belum diterima dokumen, nama paket berdasarkan Konreg diganti, SPAM hanya melayani rumah tangga, tolong ditindaklanjuti menjadi Pembangunan SPAM Regional Sambas Singkawang. Rencana induk SPAM mohon diupdate karena belum mengakomodir kegiatan di Pelabuhan Kijing	- Dit Perkim Sudah termasuk longlist Kementerian PUPR, dapat diakomodir			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16	20 Pembangunan IPLT Beserta Sarana Pendukungnya	1	1	Unit	Kota Pontianak	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		05 - Keta hanan Sosial Budaya dan Ekologi	05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Perumahan dan Kawasan Pmukiman	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	Pras arana Bidang Perumahan dan Pemukiman	002 - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		
		Catatan dan Tanggapan					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
			- DJCK, Kementerian PUPR Tidak direkomendaskna di tahun 2025, dalam SBPI akan ada pekerjaan di Pontianak terkait Pembangunan IPAL namun berbeda lokasi dengan lokasu usulan ini	- Dit. Perkim Tidak dapat diakomodir sejalan dengan apa yang disampaikan di Rakortek, disarankan agar pemerintah daerah mengfungsikan kembali IPLT tersebut.			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
17	14 Pembangunan PLBN Sei Kelik	1	1	Kawasan	Kab. Sintang	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Diusulkan ke tahun depan
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		04 - Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		10 - Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

				Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial
	Program	Kegiatan	KRO	RO
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	Pras arana Bidang Pertahanan dan Keamanan	001 - Penataan Bangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara
	Catatan dan Tanggapan			
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas
		<ul style="list-style-type: none"> - BPIW, Kementerian PUPR PLBN Sei Kelik belum dibangun karena perlu kesepakatan penlok yang ada agar sesuai dengan titik yang ada di negara Malaysia, harapannya dapat disepakati dan dipastikan agar fungsional PLBN dapat terpenuhi. - BNPP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sudah terpenuhi, Penlok sudah disepakati dalam SK Gubernur dan dokumen prasyarat lainnya, Pembangunan akan menggunakan H507. Walaupun 		<ul style="list-style-type: none"> - Dit. Perkim PLBN Sei Kelik kami akomodir selama persayarakat administrasinya dipenuhi. Meliputi, SK Gubernur dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan. - Dit Regional 2 BNPP sudah menyurati PUPR agar dapat melanjutkan PLBN ini walaupun tidak dituliskan tahun pastinya. Hak Pinjam Kawasan hutan akan diajukan lagi ke KLHK jika akses sudah terbuka. Diharapkan dapat diselesaikan karena sesuai dengan Amanah Inpres 1/2019.

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

			<p>saat ini izin sudah tidak berlaku lagi, akan kami coba untuk memperpanjangnya. Jika akses menuju lokasi PLBN sudah terbuka akan kami coba mengupdate lokasi penlok</p> <p>Tanggapang: BPIW, Kementerian PUPR: Apa lokasi PLBN sudah sesuai dengan exit point di Malaysia?</p> <p>Sudah diwawadhi melalui boarding cross agreement di tahun 2023.</p> <p>- Tanggapan: DJCK, Kementerian PUPR: Karena kami belum menerima dokumen persyaratannya maka kami menyarankan untuk diakomodir tidak di tahun ini</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

18	15 - Rehabilitasi Pengaman Pantai (Batu Kubus)/ Abrasi Pantai	5000	5000	Meter	Kab. Mempawah	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Disiapkan kembali RC dan Diarahkan untuk diusulkan kembali di tahun depan.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Prasarana Bidang Pencairan, Pertikingan, dan Penanganan Bencana		001 - Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Belum ada RC dan DED, namun surat sedang dalam proses - Pemda Kab. Mempawah Lokasi sekitr Pelabuhan Kijing di daerah jalan nasional. DED memang dialokasikan pada tahun 2025 di provinsi 		<ul style="list-style-type: none"> - DJSDA, Kementerian PUPR Masih kewenangan Provinsi, maka Kepala Daerah harus bersurat pada menteri, dan juga belum ada DED. Rehabilitasi juga tetap perlu menggunakan DED 		<ul style="list-style-type: none"> - Dit KSDA Tindak lanjut surat pemprov Kalbar ke Kementerian PUPR dan kelengkapan RC dan DED Selain itu, perlu adanya penyesuaian lagi seperti lokasi usulan 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
19	21 - Turap Jalan Sultan Hamid II dan	1,28	1,28	Km	Kota Pontianak	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIAKOMODIR: Menyesuaikan anggaran K/L		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketahanan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Dukungan Teknis		501 - Engineering Service Project for Multipurpose Dams, Rivers and Coastal			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		- Bappeda Kalimantan Barat: Mendukung jalan nasional karena di sini kiri dan kananya merupakan parit Jembatan rasau jaya, RC sudah tersedia termasuk lahan, DED, dan FS		- BPIW, Kementerian PUPR Jalan Sultan Hamid II, mencoba menyelesaikan kemacetan di sana, dengan menyelesaikan Jembatan Kapuas I, penanganan jalan apa sejalan dengan Pembangunan turap yang mengingat kanan kiri jalan merupakan badan air.		- Dit. Transport Jalan Sultan Hamid, sudah dibangun di tahun ini dan tanpa turap, Bukan turap yang menjadi masalah melainkan perlu adanya bunderan atau flyover dibagian ujung jalan persimpangan untuk meminimalisit macet			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

				- Bina Marga, Kementerian PUPR Usulan ini dapat diakomodir namun volume anggarannya disesuaikan.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	22 - Pembangunan Jembatan Rasa Jaya - Kubu	1	1	Unit	Kab. Kubu Raya	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK: Disesuaikan dengan arah kebijakan dan bidang tematik DAK.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Infrastruktur Konektivitas	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		024 - Dukungan Penanganan Jembatan Daerah			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		- Pemda. Kab. Kubu Raya Sudah ada DED dan FS, jika disetujui akan kami coba masukan ke dalam RKPD.				- Dit. Transport Kewenangan daerah karena bukan berada di ruas jalan nasional, dapat melalui DAK			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Diakomodir	5
Ditolak	15
Tidak Terbahas	0